

Analisis Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten Barito Kuala

Analysis of Factors Influencing the Development of Farmer Economic Institutions in Barito Kuala Regency

Noviannoor Firdaus¹, Luthfi Fatah², Muhammad Husaini^{2*}

¹Program Studi Magister Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru

²Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru

*Email: nika.agrica@gmail.com

(Diterima 29-05-2026; Disetujui 30-07-2026)

ABSTRAK

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) merupakan instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi petani melalui konsolidasi sumber daya secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, namun perkembangannya di Kabupaten Barito Kuala sebagai lumbung pangan utama Kalimantan Selatan masih jauh dari optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat perkembangan KEP dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian dilaksanakan pada November 2025 hingga Februari 2026 menggunakan metode survei terhadap 72 KEP yang terdiri atas 32 KEP berkembang dan 40 KEP tidak berkembang, dipilih melalui teknik *proportionate stratified random sampling* dari populasi 242 KEP. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan indeks komposit *min-max normalization* dan inferensia melalui regresi logistik biner pada enam variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan indeks kumulatif perkembangan KEP sebesar 0,47 yang masuk kategori kurang berkembang, dengan komponen perkembangan omzet mencapai indeks terendah sebesar 0,35. Empat faktor terbukti berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perkembangan KEP, yaitu aktor penggerak aktif (OR=2,434), jaringan kerja sama bisnis (OR=2,864), kaderisasi pengelola (OR=1,785), dan inovasi berkelanjutan (OR=1,870); sedangkan dukungan otoritas dan pendampingan penyuluh tidak berpengaruh signifikan. Model menjelaskan 65,9 persen variabilitas perkembangan KEP dengan ketepatan klasifikasi 81,9 persen. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori kelembagaan ekonomi pedesaan dengan menegaskan bahwa transformasi KEP menuju korporasi petani lebih ditentukan oleh kekuatan internal kelembagaan dan jaringan bisnis dibandingkan intervensi eksternal yang bersifat parsial.

Kata kunci: Kelembagaan Ekonomi Petani, Korporasi Petani, Regresi Logistik, Indeks Perkembangan, Barito Kuala

ABSTRACT

Farmer Economic Institutions (FEIs) constitute a strategic instrument for empowering farmer economies through integrated upstream-downstream resource consolidation, yet their development in Barito Kuala Regency as the main food granary of South Kalimantan remains far from optimal. This study aims to analyze the level of FEI development and the factors influencing it. The research was conducted from November 2025 to February 2026 using a survey method on 72 FEIs, consisting of 32 developed and 40 underdeveloped institutions, selected through proportionate stratified random sampling from a population of 242 FEIs. Analysis was performed descriptively using a composite min-max normalization index and inferentially through binary logistic regression on six independent variables. The results show a cumulative development index of 0.47, categorized as underdeveloped, with turnover development reaching the lowest score of 0.35. Four factors significantly influence FEI development probability: active driving actors (OR=2.434), business cooperation networks (OR=2.864), cadre formation (OR=1.785), and continuous innovation (OR=1.870); while authority support and extension assistance show no significant effects. The model explains 65.9 percent of FEI development variability with 81.9 percent classification accuracy. This study contributes to strengthening rural institutional economic theory by confirming that FEI transformation toward farmer corporations is determined more by internal institutional strength and business networks than by partial external interventions.

Keywords: *Farmer Economic Institutions, Farmer Corporation, Logistic Regression, Development Index, Barito Kuala.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian Indonesia menyerap sekitar 29,96 persen tenaga kerja nasional namun menyumbang hanya 12,4 persen Produk Domestik Bruto, mencerminkan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan pelakunya (Badan Pusat Statistik, 2023). Sensus Pertanian 2023 mencatat penurunan jumlah petani sebesar 7,42 persen dalam sepuluh tahun terakhir, sementara proporsi petani milenial berusia 25 hingga 34 tahun menurun dari 11,97 persen menjadi 10,24 persen pada periode yang sama (BPS, 2023). Fenomena penuaan pelaku usaha tani ini mengonfirmasi bahwa pertanian konvensional belum mampu menjamin kelayakan ekonomi, sehingga reformasi kelembagaan menjadi prasyarat keberlanjutan.

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dipromosikan sebagai jawaban struktural atas lemahnya posisi tawar petani, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta dioperasionalisasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016. Permentan Nomor 18 Tahun 2018 selanjutnya memperkuat arah pengembangan KEP menuju korporasi petani berbasis kawasan, yaitu badan hukum berbentuk koperasi atau perseroan dengan sebagian besar kepemilikan modal di tangan petani (Kementerian Pertanian, 2018). Transformasi ini diharapkan mengonsolidasikan seluruh nilai tambah agribisnis dari hulu hingga hilir ke dalam genggam petani, sekaligus mendorong adopsi teknologi dan profesionalisasi manajemen usaha tani.

Studi mutakhir di Asia menegaskan urgensi penguatan kelembagaan ekonomi petani sebagai katalis pendapatan rumah tangga. Toiba et al. (2024) membuktikan bahwa keanggotaan koperasi susu di Jawa Timur meningkatkan pendapatan rumah tangga dan keuntungan usaha melalui mitigasi asimetri informasi dan penurunan biaya transaksi. Siregar et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi federasi pada koperasi pertanian Jawa secara signifikan meningkatkan kinerja kelembagaan, sementara Jamaludin & Pambudy (2025) menegaskan transformasi kelembagaan melalui korporasi petani sebagai langkah strategis yang berdampak nyata pada kinerja usaha tani. Bukti empiris dari Tiongkok yang dirangkum Bin et al. (2024) memperlihatkan bahwa koperasi profesional petani mampu mengintegrasikan petani kecil ke dalam pasar modern, dengan keberhasilan yang ditentukan oleh kekuatan modal sosial, kepemimpinan, dan dukungan kebijakan.

Kabupaten Barito Kuala merupakan lumbung pangan utama Kalimantan Selatan sekaligus sentra Jeruk Siam Banjar dengan kualitas yang telah memenuhi standar ekspor, ditandai kandungan total padatan terlarut di atas 10 °Brix (BSIP Kalimantan Selatan, 2023). Produksi padi kabupaten ini mencapai 412.532 ton dengan rata-rata 35,59 kuintal per hektar dari luas panen 115.896 hektar, sedangkan produksi jeruk mencapai 95.953 ton pada tahun 2020. Besarnya potensi bahan baku ini secara teoretis merupakan modal pembentukan korporasi petani yang sangat strategis, namun realitas di lapangan menunjukkan kelembagaan ekonomi petani masih lemah dengan aktivitas petani yang berjalan individual dan terkonsentrasi pada aspek produksi semata.

Penelitian terdahulu tentang KEP di Indonesia umumnya berfokus pada wilayah Jawa dan Sumatera dengan tipologi lahan kering dan irigasi teknis, sebagaimana studi Noeng et al. (2019) di Jawa Timur, Effendy (2020) di Ciamis, serta Haryanto et al. (2022) pada lokasi *food estate*. Studi tersebut umumnya mengidentifikasi motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan sebagai faktor penentu, namun mengabaikan kekhasan kelembagaan petani pada ekosistem lahan rawa pasang surut. Kajian Fatah et al. (2022) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa mayoritas petani lahan rawa Kalimantan Selatan baru berada pada tahap evaluasi adopsi sistem agribisnis, dengan hambatan utama berupa ketiadaan pengetahuan tentang manfaat agribisnis, kenyamanan terhadap pola lama, dan minimnya teladan keberhasilan di lingkungan sekitar. Wardhana et al. (2020) memperluas analisis dengan menyoroti modal sosial pada *agro-cluster*, tetapi belum menjawab bagaimana faktor internal dan eksternal berinteraksi secara simultan pada konteks kelembagaan tahap awal di kawasan rawa. Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Gap penelitian yang ingin dijawab studi ini terletak pada tiga hal yang belum tertangani oleh literatur terdahulu. Pertama, belum ada pengukuran komposit perkembangan KEP yang spesifik pada konteks lahan rawa pasang surut yang memiliki karakteristik agroekologi dan sosiologis berbeda dari Jawa. Kedua, kajian empiris kuantitatif terhadap kontribusi simultan faktor internal (aktor penggerak, jaringan bisnis, kaderisasi, inovasi) berdampingan dengan faktor eksternal (dukungan otoritas, pendampingan) masih sangat terbatas pada KEP tingkat lapangan. Ketiga, paradoks anomali tentang ketidakefektifan dukungan otoritas dan pendampingan formal dalam mendorong perkembangan KEP

belum mendapat eksplorasi memadai padahal sangat relevan untuk reformasi kebijakan pemberdayaan petani.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori kelembagaan ekonomi pedesaan dengan mengusulkan kerangka analisis terintegrasi enam faktor pengembangan KEP yang menempatkan kekuatan internal organisasi sebagai variabel determinan utama. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan kombinasi indeks komposit *min-max normalization* untuk mengukur tingkat perkembangan dan regresi logistik biner untuk menguji kontribusi faktor, sehingga menghasilkan analisis yang sekaligus deskriptif dan prediktif. Secara praktis, hasil penelitian menyediakan dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam merancang reformasi pendampingan dan kebijakan KEP yang berorientasi pada penguatan substansi bisnis, bukan sekadar pemberian bantuan fisik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis tingkat perkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten Barito Kuala secara komposit berdasarkan lima indikator kinerja kelembagaan; kedua, menguji secara simultan dan parsial pengaruh enam faktor yaitu aktor penggerak, jaringan kerja sama bisnis, kaderisasi pengelola, dukungan otoritas, inovasi berkelanjutan, dan pendampingan penyuluh terhadap probabilitas perkembangan KEP.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rentang waktu November 2025 hingga Februari 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada signifikansi kabupaten ini sebagai sentra produksi padi dan jeruk Siam Banjar Kalimantan Selatan sekaligus sebagai daerah dengan jumlah KEP terbesar di provinsi tersebut, sehingga representatif untuk generalisasi kasus kelembagaan ekonomi petani pada agroekosistem lahan rawa pasang surut. Penelitian menggunakan rancangan survei lintas seksi (*cross-sectional survey*) dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan kausal antara variabel determinan dan probabilitas perkembangan KEP.

Populasi penelitian adalah seluruh KEP yang tercatat di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebanyak 242 KEP, terdiri atas 108 KEP kategori berkembang dan 134 KEP kategori tidak berkembang. Penentuan ukuran sampel mengikuti pendekatan *proportionate stratified random sampling* dengan perkembangan KEP sebagai dasar stratifikasi, sehingga diperoleh 72 sampel yang terdiri atas 32 KEP berkembang dan 40 KEP tidak berkembang. Teknik stratifikasi proporsional dipilih untuk menjamin representasi setiap stratum dan meminimalkan bias seleksi sebagaimana direkomendasikan Cochran (1977) dalam survei sosial-ekonomi.

Perhitungan alokasi sampel per stratum dilakukan dengan rumus alokasi proporsional sebagai berikut:

$$n_h = (N_h / N) \times n \dots\dots\dots (1)$$

dengan keterangan n_h adalah ukuran sampel stratum ke-h, N_h adalah populasi stratum ke-h, N adalah total populasi, dan n adalah total sampel yang ditetapkan; sehingga sampel KEP berkembang sebesar $(108/242) \times 72 = 32$ KEP dan sampel KEP tidak berkembang sebesar $(134/242) \times 72 = 40$ KEP, dengan asumsi homogenitas relatif di dalam stratum. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner kepada pengelola KEP terpilih, sedangkan data sekunder berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan) Kementerian Pertanian.

Variabel terikat (Y) adalah status perkembangan KEP yang diukur sebagai variabel biner berdasarkan lima indikator kinerja: bantuan permodalan, bantuan sarana produksi, jaminan harga, perkembangan jumlah anggota, dan perkembangan omzet usaha. Setiap indikator diberi skor pada skala likert tiga tingkat, lalu dijumlahkan dan dikonversikan ke persentase terhadap skor maksimum; KEP yang memperoleh skor total ≥ 60 persen diberi nilai 1 dengan kategori berkembang, sedangkan < 60 persen diberi nilai 0 dengan kategori tidak berkembang. Variabel bebas terdiri atas enam faktor pengembangan yaitu aktor penggerak (X1), jaringan kerja sama bisnis (X2), kaderisasi pengelola (X3), dukungan otoritas (X4), inovasi berkelanjutan (X5), dan pendampingan penyuluh (X6), yang seluruhnya diukur dengan mekanisme skoring identik dengan variabel terikat.

Analisis tujuan pertama menggunakan pendekatan deskriptif dengan perhitungan indeks komposit melalui metode *min-max normalization* yang diadopsi dari standar perhitungan Indeks Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan, 2021) dan Indeks Pembangunan Manusia UNDP. Formulasi indeks dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = (X_{ij} - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min}) \dots \dots \dots (2)$$

dengan X_{ij} adalah skor KEP ke-i pada indikator ke-j, $X_{\min}$ adalah skor minimum yang mungkin, dan $X_{\max}$ adalah skor maksimum yang mungkin; hasil indeks bernilai antara 0 hingga 1 dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam empat kriteria perkembangan dengan pembagian interval kuartil. Klasifikasi kriteria meliputi indeks 0,00 hingga 0,25 kategori tidak berkembang, 0,26 hingga 0,50 kurang berkembang, 0,51 hingga 0,75 berkembang, dan 0,76 hingga 1,00 sangat berkembang. Pendekatan ini menjamin komparabilitas antar indikator yang memiliki skala pengukuran berbeda dan memudahkan interpretasi tingkat perkembangan secara komposit.

Analisis tujuan kedua menggunakan regresi logistik biner karena variabel terikat berbentuk dikotomi nominal, sehingga asumsi normalitas dan homoskedastisitas pada regresi linear tidak berlaku (Hosmer Jr et al., 2013). Model regresi logistik yang dispesifikasikan adalah:

$$\ln(P / (1-P)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 \dots \dots \dots (3)$$

dengan $\ln(P / (1-P))$ adalah logit probabilitas KEP berkembang, β_0 adalah konstanta, β_1 hingga β_6 adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas X_1 aktor penggerak, X_2 jaringan kerja sama bisnis, X_3 kaderisasi pengelola, X_4 dukungan otoritas, X_5 inovasi berkelanjutan, dan X_6 pendampingan penyuluh. Estimasi parameter dilakukan dengan metode *maximum likelihood* melalui iterasi *Fisher scoring* untuk mendapatkan koefisien yang paling mendekati data empiris (Agresti, 2018).

Kebaikan model diuji dengan tiga prosedur yang saling melengkapi. Uji kebaikan-suai menggunakan Hosmer-Lemeshow yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\chi^2_{HL} = \sum (O_i - N_i \pi_i)^2 / [N_i \pi_i (1 - \pi_i)] \dots \dots \dots (4)$$

dengan N_i adalah total frekuensi pengamatan kelompok ke-i, O_i adalah frekuensi pengamatan kelompok ke-i, dan π_i adalah rata-rata taksiran peluang kelompok ke-i; model dinyatakan fit jika *p-value* > 0,05. Pengaruh simultan variabel bebas diuji melalui *Omnibus Test* menggunakan statistik G sebagai berikut:

$$G = -2 \ln (L_0 / L_1) \dots \dots \dots (5)$$

dengan L_0 adalah nilai *likelihood* model tanpa variabel bebas dan L_1 adalah nilai *likelihood* model lengkap; statistik G mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas sebanyak jumlah parameter. Pengaruh parsial setiap variabel diuji dengan statistik Wald yang dirumuskan:

$$W = \beta_j / SE(\beta_j) \dots \dots \dots (6)$$

dengan β_j adalah estimasi koefisien variabel ke-j dan $SE(\beta_j)$ adalah *standard error* koefisien tersebut; variabel dinyatakan signifikan jika nilai $p < 0,05$. Interpretasi pengaruh dilakukan melalui *odds ratio* yang dihitung sebagai eksponensial dari β :

$$OR = \exp(\beta_j) \dots \dots \dots (7)$$

Nilai $OR > 1$ mengindikasikan kecenderungan KEP berkembang lebih tinggi dengan keberadaan faktor tersebut, sedangkan $OR < 1$ mengindikasikan sebaliknya. Daya jelas model diukur dengan *Nagelkerke R-Square* yang merupakan modifikasi koefisien Cox dan Snell dengan rentang nilai 0 hingga 1. Seluruh prosedur analisis statistik dijalankan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tingkat signifikansi α sebesar 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Status Legalitas KEP di Kabupaten Barito Kuala

Karakteristik legalitas KEP di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dengan hanya 5 persen KEP yang telah memiliki badan hukum, sementara 61 persen masih berstatus Surat Keputusan (SK) dan 6 persen sisanya hanya memiliki izin operasional. Konfigurasi legalitas yang lemah ini secara langsung membatasi kemampuan KEP melakukan perjanjian bisnis kontraktual dengan pihak ketiga, mengakses pembiayaan formal, dan menjamin keberlanjutan kemitraan rantai pasok. Ketiadaan badan hukum yang kuat juga menjadi hambatan

struktural bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola karena akses terhadap pelatihan formal dan pendampingan teknis sering mensyaratkan status kelembagaan yang sah secara hukum.

Temuan ini selaras dengan kesimpulan Toiba et al. (2024) yang menegaskan bahwa formalisasi kelembagaan menjadi prasyarat utama untuk mengakses sumber daya finansial dan jaringan bisnis modern. Konteks Barito Kuala memperlihatkan bahwa transformasi KEP menuju korporasi petani sebagaimana diamanatkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 masih berada pada tahap embrional, di mana sebagian besar KEP belum memenuhi syarat dasar legalitas untuk dianggap sebagai entitas bisnis. Implikasi praktisnya adalah kebijakan penguatan KEP harus diawali dengan fasilitasi legalisasi badan hukum yang terstruktur, bukan dengan pemberian bantuan fisik yang tidak akan optimal tanpa fondasi legal yang memadai.

Peran Aktor Penggerak dalam KEP

Hasil analisis profil aktor penggerak KEP di Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 menunjukkan ketimpangan tajam antara kemampuan manajerial jangka pendek dengan visi strategis jangka panjang sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Indikator pembagian tugas dinilai berperan aktif oleh 59,72 persen responden dan aktivitas aktor mencapai 52,78 persen, mengindikasikan bahwa roda operasional harian organisasi berjalan cukup baik dengan struktur yang berfungsi dan rapat rutin yang terlaksana. Namun, indikator perencanaan pengembangan menunjukkan 70,83 persen aktor dinilai kurang berperan, menyingkap inti permasalahan stagnasi bisnis KEP secara struktural.

Tabel 1. Peran Aktor dalam Kegiatan KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2025

No	Komponen Peran Aktor	Berperan/Aktif (%)	Kurang Berperan (%)	Tidak Berperan (%)
1	Aktivitas aktor	52,78	44,44	2,78
2	Pembagian tugas	59,72	36,11	4,17
3	Transparansi aktor	51,39	45,83	2,78
4	Rencana pengembangan	20,83	70,83	8,33
5	Urun rembuk	51,39	40,28	8,33
Rata-rata		47,22	47,50	5,28

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)

Kondisi tersebut menyebabkan pengurus KEP tidak memiliki peta jalan bisnis yang jelas, tidak memiliki strategi ekspansi pasar, dan tidak memiliki mitigasi risiko untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Dalam literatur manajemen strategis, kondisi ini sering disebut sebagai *strategic myopia*, yaitu kondisi di mana pemimpin organisasi cakap dalam menjaga operasional harian tetapi gagal merancang masa depan organisasi. Ketiadaan rencana pengembangan inilah yang menjelaskan mengapa omzet usaha cenderung stagnan, sebab tanpa perencanaan baru tidak akan tercipta aliran pendapatan baru.

Dominasi pola kepemimpinan yang aktif secara sosial namun pasif dalam pengembangan usaha menegaskan bahwa KEP di Barito Kuala masih dikelola dengan *mindset* pertanian tradisional dan belum bertransformasi menuju agribisnis modern. Tingginya aktivitas aktor sebesar 52,78 persen tanpa diiringi rencana pengembangan yang matang berisiko menciptakan inefisiensi tenaga dan sumber daya, sebagaimana ditemukan pada studi kelembagaan petani di lokasi *food estate* oleh Haryanto et al. (2022). Fenomena ini sejalan dengan kerangka Sosiologi Pedesaan yang menempatkan tokoh masyarakat sebagai ketua kelompok berdasarkan senioritas sosial (askripsi), bukan berdasarkan kompetensi bisnis (prestasi), sehingga aktivitas yang terekam dalam data sebagian besar bersifat sosial-kultural alih-alih berorientasi profit dan inovasi bisnis. Solusi mendesak yang dibutuhkan adalah reformasi *mindset* kepemimpinan dari sekadar administrator kelompok menjadi arsitek bisnis yang mampu merancang *grand design* kemajuan ekonomi petani secara terstruktur.

Lemahnya peran aktor pada aspek perencanaan strategis berimplikasi langsung pada terganggunya fungsi KEP sebagai integrator subsistem agribisnis yang utuh. Secara konseptual, KEP idealnya mengintegrasikan empat subsistem agribisnis yaitu subsistem hulu (penyediaan sarana produksi), subsistem usaha tani (produksi primer), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran), serta subsistem jasa pendukung (pembiayaan, penyuluhan, dan kebijakan). Aktor penggerak yang lemah dalam perencanaan strategis menyebabkan keterputusan integrasi antar subsistem tersebut, sehingga nilai tambah agribisnis tidak terakumulasi di tangan petani melainkan tertangkap oleh pelaku rantai pasok di luar KEP. Implikasi praktisnya adalah penguatan kapasitas strategis aktor menjadi *entry point* reformasi yang lebih fundamental daripada sekadar penambahan sarana dan prasarana fisik.

Selain berperan sebagai integrator subsistem agribisnis, aktor penggerak juga memegang fungsi sentral sebagai jembatan antara unit-unit usaha internal KEP dengan *stakeholder* eksternal. Unit-unit usaha internal yang dimaksud meliputi jasa alat-mesin pertanian (UPJA), unit permodalan, unit pemasaran, dan unit pengolahan hasil; sementara *stakeholder* eksternal mencakup perbankan, perguruan tinggi, perusahaan mitra, dan pemerintah. Kemandekan pada salah satu kanal interaksi tersebut langsung mereduksi efektivitas keseluruhan sistem, sebagaimana terkonfirmasi dari rendahnya skor perencanaan pengembangan dalam data lapangan. Reformulasi struktur kelembagaan KEP perlu diarahkan pada keterhubungan multidimensional antar unit dan *stakeholder*, bukan struktur hirarkis kaku yang menutup peluang inovasi dan kolaborasi lintas pihak.

Jaringan Kerja sama Bisnis KEP

Data lapangan pada Tabel 2 menunjukkan fenomena “isolasi kelembagaan” yang dialami mayoritas KEP di Kabupaten Barito Kuala. Rata-rata 46,53 persen KEP sama sekali tidak memiliki koneksi atau mitra kerja sama dengan pihak luar, dengan rincian 44,44 persen tidak memiliki jaringan kerja sama umum dan 48,61 persen tidak memiliki unit kerja sama bisnis yang aktif. Dalam perspektif Sosiologi Ekonomi dan teori *Supply Chain Management*, kondisi ini menempatkan KEP dalam posisi atomistik, yaitu unit-unit kecil yang berdiri sendiri, terasing, dan tidak terintegrasi dengan sistem pasar yang lebih luas.

Tabel 2. Jaringan Kerja Sama dan Unit Kerja Sama KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2025

No	Jaringan Kerja sama	Ada Banyak (≥ 2) (%)	Ada Sedikit (=1) (%)	Tidak Ada (%)
1	Jaringan kerja sama	6,94	48,61	44,44
2	Unit kerja sama bisnis	12,50	38,89	48,61
	Rata-rata	9,72	43,75	46,53

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)

Keterangan: kategori “banyak” merujuk kerja sama dengan lebih dari dua lembaga dari koperasi/KDMP, pasar modern, BUMN, bank, perusahaan, pemerintah, dan perguruan tinggi.

Ketiadaan jejaring ini menjadi penyebab utama lambatnya difusi inovasi teknologi karena tidak ada transfer pengetahuan dari mitra, sekaligus menjelaskan mengapa kepastian pasar tidak pernah tercapai. KEP memproduksi komoditas pertanian tanpa memiliki mitra pasar yang siap membeli dan tanpa informasi tentang standar kualitas yang dibutuhkan, sehingga terus berputar dalam siklus pertanian bernilai tambah rendah. Temuan ini sejalan dengan analisis Wardhana et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kerja sama horizontal antar petani secara signifikan meningkatkan akses pasar, namun di Barito Kuala potensi kerja sama tersebut belum termobilisasi karena lemahnya inisiatif kelembagaan dari aktor pengelola.

Analisis lebih lanjut pada segmen KEP yang sudah memiliki kerja sama (sekitar 50 persen sisanya) memperlihatkan kelemahan kualitatif berupa terbatasnya keragaman kemitraan. Pola kerja sama yang terbangun cenderung bersifat tunggal atau terbatas pada satu mitra saja, sehingga menciptakan struktur pasar monopsoni di mana posisi tawar KEP menjadi sangat lemah. Jika mitra tunggal memutuskan kontrak sepihak atau menurunkan harga beli, KEP tidak memiliki opsi alternatif dan terancam kolaps; idealnya sebuah lembaga ekonomi yang sehat harus memiliki portofolio mitra yang diversifikatif untuk memitigasi risiko bisnis sebagaimana ditekankan Ton et al. (2018) dalam meta-analisis *contract farming* di negara berkembang.

Kaderisasi Pengelola KEP

Analisis dinamika regenerasi pada Tabel 3 memperlihatkan anomali positif di tengah krisis penuaan petani nasional. Pelibatan generasi muda di KEP Kabupaten Barito Kuala mencapai 68,06 persen secara terstruktur, mematahkan stigma bahwa pertanian tidak lagi menarik bagi kaum muda. KEP di Batola tampaknya berhasil menjadi wadah inkubasi bagi *successor* usaha tani, salah satunya didorong intervensi program Brigade Pangan dari Kementerian Pertanian yang beranggotakan mayoritas petani berumur di bawah 40 tahun pada lokasi program Optimasi Lahan Rawa dan Cetak Sawah Rakyat sejak tahun 2024.

Tabel 3. Kaderisasi dan Peningkatan Pengetahuan Kader Pengelola KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2025

No	Komponen Kaderisasi	Terstruktur (%)	Tidak Terstruktur (%)	Tidak Dilakukan (%)
1	Kaderisasi pengelola KEP	43,06	37,50	19,44
2	Pelibatan generasi muda	68,06	22,22	9,72

3	Pelatihan kader	61,11	30,56	8,33
4	Studi banding kader	40,28	37,50	22,22
	Rata-rata	53,13	31,94	14,93

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)

Namun, perbandingan antara angka pelibatan generasi muda sebesar 68,06 persen dengan angka kaderisasi pengelola sebesar 43,06 persen menyingkap *gap* partisipasi yang penting dicermati. Di luar Brigade Pangan, pada KEP dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), pemuda banyak dilibatkan dalam aktivitas operasional namun posisi strategis sebagai pengelola atau pengambil keputusan utama masih didominasi generasi tua dan tokoh senior. Pelibatan tinggi tanpa pendelegasian wewenang nyata dapat menyebabkan pemuda merasa hanya dijadikan objek pelengkap struktur organisasi, bukan subjek pembaharu, sehingga potensi energi progresif kaum muda terbuang dan tidak berdampak pada modernisasi lembaga (Syafuruddin, 2024).

Komitmen pengembangan kapasitas intelektual tergolong kuat dengan 61,11 persen kegiatan peningkatan pengetahuan dilakukan secara terstruktur. Namun, mengingat fakta omzet stagnan dan pemasaran lemah pada KEP yang sama, terdapat dugaan kuat adanya *mismatch* antara materi pelatihan dengan kebutuhan riil di lapangan. Besar kemungkinan kurikulum pelatihan masih terjebak pada ranah teknis budidaya (*on-farm*) dan sangat minim menyentuh aspek agribisnis (*off-farm*) seperti manajemen rantai pasok, pemasaran digital, atau negosiasi kontrak. Hal ini diperkuat oleh data studi banding yang angka terstrukturnya paling rendah (40,28 persen), mengindikasikan KEP di Barito Kuala kurang memiliki referensi pembanding praktik bisnis pertanian modern di luar wilayah.

Dukungan Otoritas terhadap KEP

Analisis terhadap Tabel 4 memberikan gambaran pola intervensi yang masih bersifat parsial atau setengah jalan, alih-alih dukungan yang tuntas. Pemerintah Kabupaten memiliki jangkauan yang sedikit lebih luas dibandingkan Pemerintah Provinsi, terkonfirmasi dari angka ketiadaan dukungan dari Kabupaten yang lebih rendah (29,17 persen) dibandingkan Provinsi (37,50 persen). Hal ini wajar mengingat Pemerintah Kabupaten merupakan entitas administratif yang paling dekat dengan KEP sehingga memiliki rentang kendali yang lebih efektif dalam mendistribusikan bantuan.

Tabel 4. Dukungan Otoritas berupa Pendanaan, Fasilitas, dan Non-Pendanaan KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2025

No	Bentuk Dukungan Otoritas	Ada Sepenuhnya (%)	Ada Sebagian (%)	Tidak Ada (%)
1	Pendanaan & fasilitas dari Kabupaten	26,39	44,44	29,17
2	Pendanaan & fasilitas dari Provinsi	27,78	34,72	37,50
3	Non-pendanaan dari Kabupaten & Provinsi	9,72	38,89	51,39
	Rata-rata	21,30	39,35	39,35

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)

Perhatian khusus harus tertuju pada dominasi kategori “Ada dan Sebagian” yang mencapai 44,44 persen dari Kabupaten dan 34,72 persen dari Provinsi, mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan cenderung tidak mencukupi kebutuhan riil atau tidak berkelanjutan. Pola bantuan fragmentaris ini seringkali hanya cukup untuk mempertahankan jalannya KEP tetapi gagal mendorong transformasi bisnis yang signifikan, sebagaimana dikemukakan Effendy (2020) dalam evaluasi model pengembangan KEP di Ciamis. Akibatnya KEP menjadi bergantung pada siklus bantuan proyek tahunan pemerintah tanpa pernah benar-benar mandiri secara kapital.

Sisi yang jauh lebih mengkhawatirkan terlihat pada indikator dukungan bukan pendanaan, di mana 51,39 persen KEP sama sekali tidak menerima dukungan non-pendanaan dari pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi. Dukungan bukan pendanaan yang meliputi fasilitasi legalitas badan hukum, akses regulasi, advokasi kebijakan, serta pembukaan akses pasar sebenarnya adalah fondasi utama bagi kemandirian lembaga. Tingginya angka ketiadaan dukungan ini mencerminkan paradigma birokrasi yang masih terjebak pada model “Proyek Fisik” dan abai pada fungsi utamanya sebagai fasilitator dan regulator; tanpa intervensi kebijakan yang bersifat *soft-structure*, bantuan finansial sebanyak apapun tidak akan efektif karena KEP tidak memiliki legitimasi formal untuk beroperasi sebagai entitas bisnis yang sah.

Inovasi Berkelanjutan dalam KEP

Tabel 5 mengungkap fenomena yang dapat disebut sebagai “digitalisasi bayangan” di mana 50,00 persen KEP dinyatakan memiliki dukungan komputerisasi yang “Ada dan Berkelanjutan”. Sekilas hal ini terlihat seperti kemajuan dan modernisasi, namun ketika disandingkan dengan indikator inovasi pemasaran yang tergolong rendah, timbul pertanyaan kritis tentang fungsi sebenarnya dari perangkat tersebut. Analisis menunjukkan komputerisasi di KEP Barito Kuala kemungkinan besar hanya sebatas fungsi administratif dasar seperti mengetik surat, membuat proposal bantuan, atau mencatat absensi; bukan sebagai alat pendukung kelancaran bisnis melalui *digital marketing* dan ekspansi pasar *online*.

Tabel 5. Inovasi Berkelanjutan dalam Pengembangan dan Pemasaran Hasil Produk KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2025

No	Komponen Inovasi	Berkelanjutan (%)	Kurang Berkelanjutan (%)	Tidak Ada (%)
1	Uji coba teknologi dan inovasi	34,72	36,11	29,17
2	Dukungan komputerisasi pengelolaan	50,00	13,89	36,11
3	Pemasaran hasil produksi	18,06	22,22	59,72
4	Kerja sama bisnis legal (kontraktual)	5,56	23,61	70,83
	Rata-rata	27,08	23,96	48,96

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)

Data yang paling mencolok dan memerlukan intervensi segera adalah 70,83 persen KEP sama sekali tidak memiliki kerja sama bersifat legal atau kontraktual. Dalam dunia bisnis, *contract farming* merupakan instrumen utama yang menjamin kepastian siapa yang akan membeli hasil panen dan berapa harganya. Ketiadaan kontrak ini mengonfirmasi bahwa hubungan bisnis KEP masih berbasis kepercayaan lisan yang sangat rapuh dan tradisional, sehingga jika pembeli lari atau harga jatuh, KEP tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut. Kondisi ini diperparah data bahwa 59,72 persen KEP tidak memiliki inovasi dalam pemasaran hasil produksi, mengindikasikan mayoritas KEP masih berjualan dengan cara kuno yaitu panen, masukkan karung, tunggu tengkulak, jual curah.

Hanya empat KEP yang terkonfirmasi memiliki inovasi pemasaran produk dengan upaya *branding*, *packaging*, dan hilirisasi. Padahal nilai tambah terbesar berada di pengemasan dan olahan, sehingga gabungan ketiadaan kontrak legal dan ketiadaan inovasi pemasaran ini menjelaskan secara tuntas mengapa omzet KEP stagnan. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Ton et al. (2018) yang menunjukkan bahwa *contract farming* dapat meningkatkan pendapatan *smallholder* sebesar 23 hingga 54 persen, namun efek ini hanya tercapai jika ada kerangka kelembagaan dan inovasi pemasaran yang memadai. KEP di Barito Kuala sedang mengalami krisis identitas bisnis: ingin maju namun terikat kuat oleh cara-cara kerja masa lalu yang serba informal dan pasif.

Pendampingan Penyuluh KEP

Tabel 6 menunjukkan pelaksanaan tugas penyuluhan berjalan cukup aktif pada fase eksekusi lapangan dengan 62,50 persen responden menyatakan pendampingan “Ada dan Sepenuhnya” dan 48,61 persen pada fungsi pembinaan. Angka ini mengonfirmasi bahwa secara kuantitas, intensitas kehadiran dan rutinitas transfer informasi oleh penyuluh kepada KEP relatif tinggi. Namun, titik kritis inefektivitas peran penyuluh terungkap sangat jelas pada indikator ketiga di mana pelaksanaan evaluasi mencatat angka mutlak 100,00 persen pada kategori “Tidak Ada”.

Tabel 6. Kegiatan Pendampingan KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2025

No	Indikator	Ada Sepenuhnya (%)	Ada Tidak Sepenuhnya (%)	Tidak Ada (%)
1	Pendampingan	62,50	34,72	2,78
2	Pembinaan	48,61	48,61	2,78
3	Evaluasi	0,00	0,00	100,00
	Rata-rata	37,04	27,78	35,17

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)

Fakta ini merupakan kelemahan sistemik yang paling krusial karena tingginya angka pendampingan dan pembinaan menjadi kehilangan makna strategis tanpa diikuti proses evaluasi pencapaian. Kegiatan penyuluhan cenderung berhenti pada tahap menggugurkan kewajiban administratif, tanpa upaya mengukur sejauh mana materi yang diberikan mampu diadopsi dan berdampak pada skala bisnis KEP. Temuan kuantitatif ini memberikan jawaban atas hasil uji regresi logistik di mana variabel pendampingan penyuluh (X6) terbukti tidak signifikan secara parsial. Tanpa adanya

instrumen evaluasi yang absen sepenuhnya, pendampingan berjalan tanpa arah ukur yang jelas dan gagal merespons dinamika persoalan manajerial KEP.

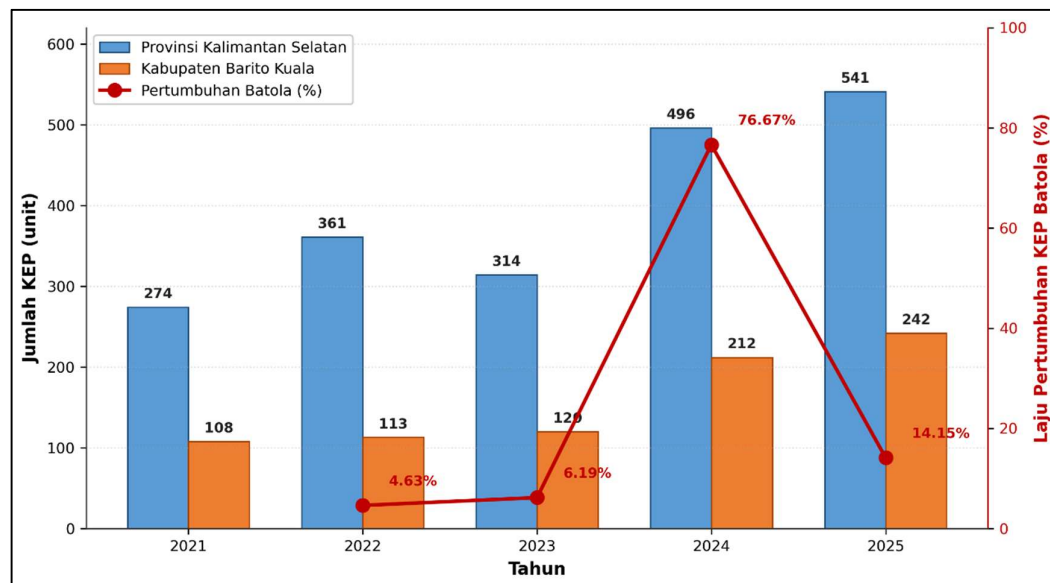
Perkembangan KEP Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan sebagai pusat pengembangan KEP di Kalimantan Selatan, terlihat dari jumlah KEP yang rata-rata mencapai 159 unit selama periode 2021 hingga 2025 atau berkontribusi rata-rata 39,28 persen terhadap total KEP provinsi. Untuk tahun 2025, dengan jumlah KEP Kalimantan Selatan sebanyak 541 dan KEP Barito Kuala sebanyak 242, kontribusi kabupaten ini menjadi sangat besar yaitu 44,73 persen atau hampir setengah jumlah KEP di Kalimantan Selatan berada di Barito Kuala. Perkembangan jumlah KEP di Barito Kuala cukup pesat, tumbuh dari 108 unit pada 2021 menjadi 242 unit pada 2025 atau lebih dari dua kali lipat, dengan laju pertumbuhan rata-rata 25,41 persen per tahun.

Tabel 7. Perkembangan Jumlah KEP di Kabupaten Barito Kuala, 2021-2025

Tahun	KEP Kalimantan Selatan	KEP Barito Kuala	Pertumbuhan Batola (%)
2021	274	108	-
2022	361	113	4,63
2023	314	120	6,19
2024	496	212	76,67
2025	541	242	14,15
Rata-rata	397	159	25,41

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, 2025 (diolah)



Gambar 1. Perkembangan jumlah KEP di Kabupaten Barito Kuala dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan serta laju pertumbuhan tahunan KEP Barito Kuala periode 2021-2025

Gambar 1 menyajikan visualisasi komparatif yang menunjukkan loncatan pertumbuhan luar biasa pada periode 2023 ke 2024 sebesar 76,67 persen, di mana jumlah KEP melonjak dari 120 menjadi 212 unit. Pertumbuhan eksplosif ini berkaitan dengan masuknya program Brigade Pangan dari Kementerian Pertanian yang dimulai tahun 2024 dalam rangka Optimasi Lahan Rawa dan Cetak Sawah Rakyat. Namun, pertumbuhan kuantitatif yang pesat ini tidak otomatis diikuti dengan kematangan kelembagaan, sebagaimana terbukti dari rendahnya indeks kinerja yang akan dibahas pada sub-bab berikutnya, sehingga muncul paradoks pertumbuhan kuantitas tanpa kemajuan kualitas.

Perkembangan KEP Berdasarkan Peran Fungsional

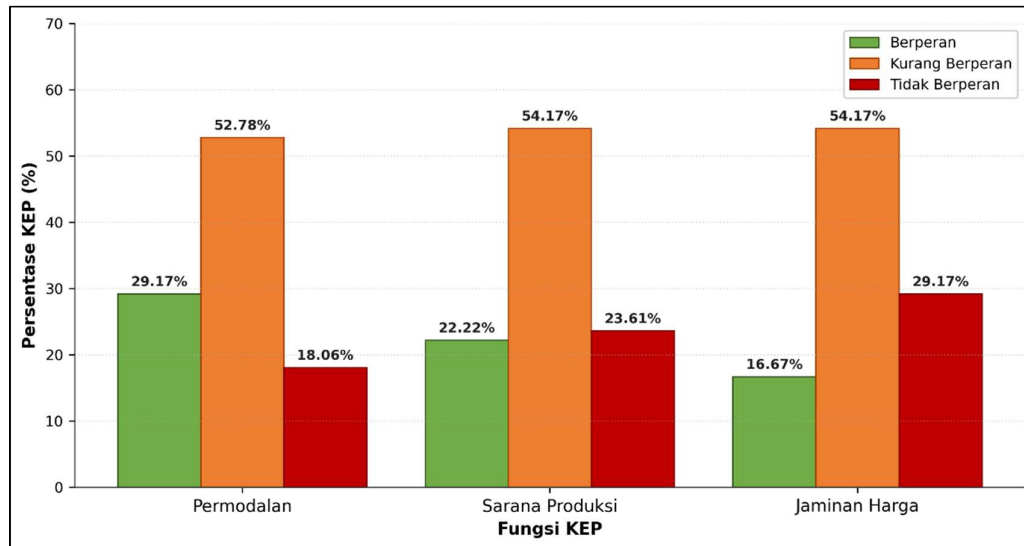
Tabel 8 menyajikan analisis perkembangan KEP berdasarkan peran fungsionalnya dalam tiga aspek utama yang merupakan tujuan pembentukan KEP. Analisis difokuskan pada aspek hilir yang merupakan titik paling krusial dalam agribisnis, yaitu pemasaran dan jaminan harga. Data

menunjukkan kegagalan institusional yang sangat serius di mana mayoritas KEP di Kabupaten Barito Kuala dinilai “Kurang Berperan” (54,17 persen) dan “Tidak Berperan” (29,17 persen) dalam aspek jaminan harga produk.

Tabel 8. Perkembangan KEP Berdasarkan Perannya pada Tiga Fungsi Utama

No	Peran KEP	Berperan (%)	Kurang Berperan (%)	Tidak Berperan (%)
1	Permodalan	29,17	52,78	18,06
2	Sarana produksi	22,22	54,17	23,61
3	Jaminan harga	16,67	54,17	29,17
	Rata-rata	22,69	53,70	23,61

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)



Gambar 2. Profil peran KEP berdasarkan tiga fungsi utama menunjukkan dominasi kategori kurang berperan pada seluruh fungsi

Gambar 2 mengonfirmasi visualisasi data tabel di atas dengan menunjukkan pola yang konsisten: kategori kurang berperan mendominasi seluruh fungsi dengan rentang 52,78 persen hingga 54,17 persen, sementara kategori berperan justru paling rendah pada fungsi jaminan harga (16,67 persen). Akumulasi persentase kegagalan pada aspek jaminan harga mencapai 83,34 persen, menempatkan petani dalam struktur pasar oligopsoni di mana mereka berhadapan sendirian dengan tengkulak sebagai *price maker* sementara petani menjadi *price taker*. Dalam teori ekonomi kelembagaan, fungsi *hedging* atau perlindungan risiko harga adalah alasan utama mengapa petani perlu berkelompok; kegagalan KEP menjalankan fungsi ini berarti ketiadaan insentif keamanan finansial bagi anggotanya, sehingga keanggotaan KEP kehilangan daya tarik substantif.

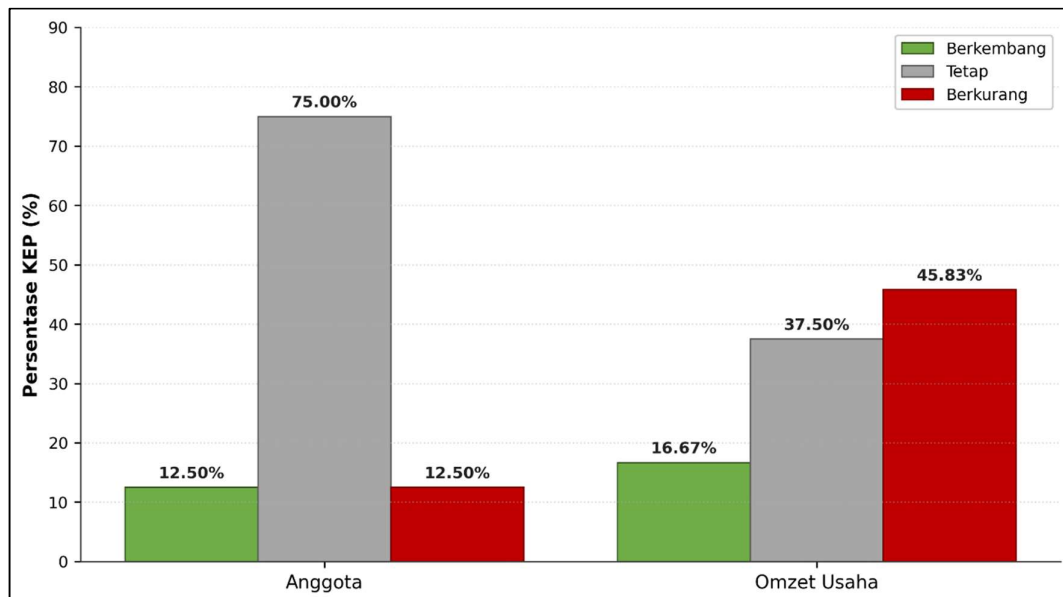
Status Perkembangan KEP Berdasarkan Jumlah Anggota dan Omzet Usaha

Tabel 9 menyajikan status KEP berdasarkan dua indikator kinerja kelembagaan yaitu jumlah anggota dan omzet usaha. Data menunjukkan dominasi kategori “tetap” pada jumlah anggota (75,00 persen) yang sepiantas terlihat positif sebagai wujud loyalitas, namun dalam perspektif pengembangan bisnis progresif justru mengindikasikan stagnasi daya tarik kelembagaan. KEP gagal menjadi magnet pertumbuhan yang mampu mengundang minat petani baru, terbukti dari rendahnya penambahan anggota yang hanya mencapai 12,50 persen dan adanya 12,50 persen KEP yang justru mengalami penurunan anggota.

Tabel 9. Status KEP Berdasarkan Perubahan Jumlah Anggota dan Omzet Usaha

Kondisi KEP	Berkembang (%)	Tetap (%)	Berkurang (%)
Anggota	12,50	75,00	12,50
Omzet usaha	16,67	37,50	45,83

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)



Gambar 3. Status perkembangan KEP berdasarkan perubahan jumlah anggota dan omzet usaha menunjukkan ketimpangan antara stabilitas sosial dan kontraksi ekonomi

Kondisi yang terlihat aman secara sosial ini menjadi sangat mengkhawatirkan ketika disandingkan dengan realitas omzet usaha yang sedang mengalami kontraksi berat, di mana 45,83 persen KEP mengalami penurunan omzet secara riil. Angka ini menjadi tanda bahaya bahwa hampir separuh kelembagaan sedang mengalami kebocoran aset, kehilangan pangsa pasar, atau inefisiensi operasional yang akut. Permasalahan ini semakin pelik dengan keberadaan kelompok mayoritas sebesar 37,50 persen yang kondisi omzetnya “tetap”, yang dalam konteks inflasi tahunan dan kenaikan biaya produksi pertanian sebenarnya bermakna terjadinya kemunduran nilai tukar pendapatan atau *hidden regression*.

Agregasi kedua variabel tersebut memperlihatkan bahwa KEP di Barito Kuala sedang terperangkap dalam gejala “invulusi kelembagaan”, di mana organisasi tetap utuh secara fisik karena kuatnya ikatan solidaritas kekerabatan namun keropos secara substansi ekonomi. KEP lebih berfungsi sebagai paguyuban sosial dibandingkan entitas bisnis profesional, kondisi struktural yang menuntut reformasi tata kelola segera sebelum akumulasi ketidakpuasan anggota mendorong penurunan anggota lebih banyak di masa depan. Temuan ini sejalan dengan konsep *institutional involution* yang dikemukakan Wardhana et al. (2020) dalam konteks *agro-cluster* Indonesia, di mana organisasi bertambah secara kuantitas tanpa peningkatan kualitas substantif.

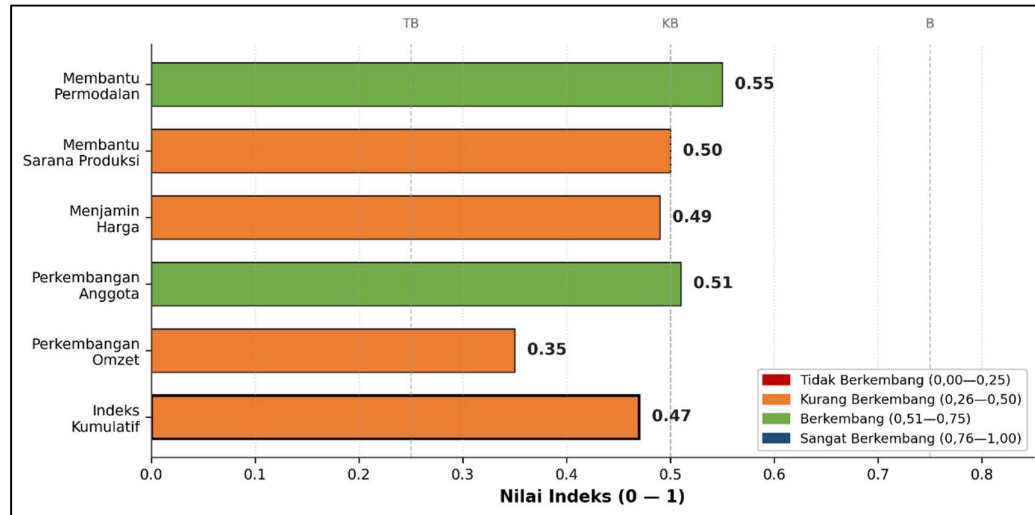
Indeks Komposit Perkembangan KEP

Berdasarkan integrasi seluruh komponen perkembangan KEP, indeks kumulatif rata-rata diperoleh sebesar 0,47 yang masuk kategori kurang berkembang sebagaimana disajikan pada Tabel 10. Tiga komponen yang menyumbang penilaian kurang berkembang adalah membantu sarana produksi (indeks 0,50), menjamin harga (indeks 0,49), dan perkembangan omzet usaha (indeks 0,35); sementara dua komponen yang berkategori berkembang adalah membantu permodalan (indeks 0,55) dan perkembangan anggota (indeks 0,51). Pola ini mengindikasikan bahwa KEP di Barito Kuala lebih kuat pada fungsi awal pembentukan kelembagaan (akses modal dan rekrutmen anggota), namun lemah pada fungsi pengembangan bisnis yang lebih kompleks (sarana, harga, omzet).

Tabel 10. Indeks Komposit Perkembangan KEP di Kabupaten Barito Kuala

Komponen Perkembangan KEP	Indeks	Kriteria
Membantu permodalan	0,55	Berkembang
Membantu sarana produksi	0,50	Kurang Berkembang
Menjamin harga	0,49	Kurang Berkembang
Perkembangan anggota	0,51	Berkembang
Perkembangan omzet	0,35	Kurang Berkembang
Indeks Kumulatif	0,47	Kurang Berkembang

Sumber: Data primer, 2025 (diolah)



Gambar 4. Indeks komposit perkembangan KEP per komponen menunjukkan komponen omzet sebagai titik terlemah dan indeks kumulatif berada pada kategori kurang berkembang

Gambar 4 memvisualisasikan ketimpangan antar komponen secara nyata, di mana komponen omzet (0,35) berjarak sangat jauh dari komponen permodalan (0,55) sebagai komponen terkuat. Hasil ini mengonfirmasi bahwa petani anggota KEP belum mendapatkan manfaat ekonomi secara optimal, dengan dampak yang sangat nyata pada penurunan omzet usaha KEP. Indeks kumulatif sebesar 0,47 berada di ambang batas atas kategori kurang berkembang (batas atas 0,50), menunjukkan KEP Barito Kuala berada pada titik kritis transformasi: berpotensi naik kelas menjadi berkembang jika ada reformasi substansial atau justru turun jika kondisi dibiarkan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan KEP

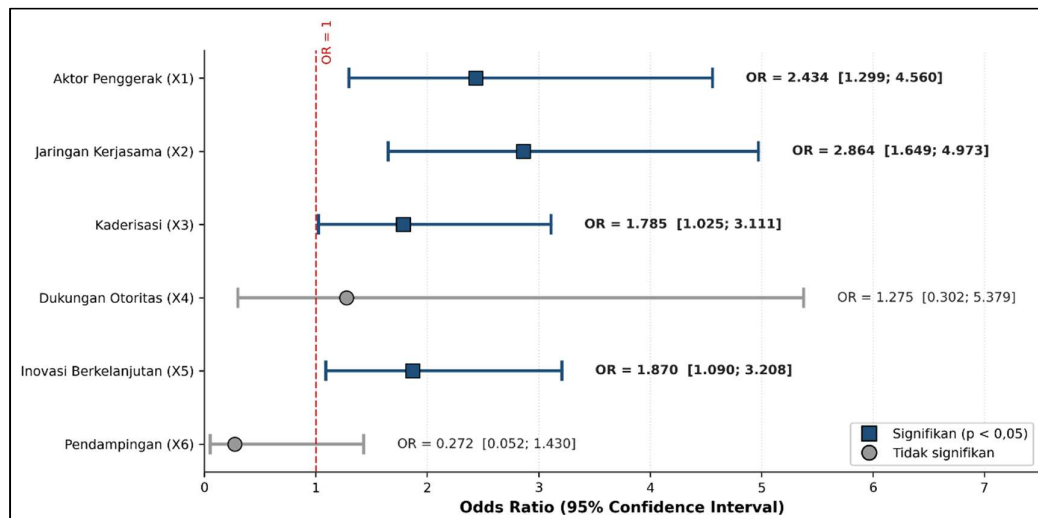
Hasil estimasi model regresi logistik biner terhadap probabilitas perkembangan KEP disajikan pada Tabel 11. Model dinyatakan layak digunakan berdasarkan uji Hosmer-Lemeshow dengan nilai *chi-square* sebesar 8,860 dan *p-value* 0,354 yang lebih besar dari $\alpha=0,05$, sehingga hipotesis nol bahwa model *fit* tidak dapat ditolak. Uji simultan *Omnibus Test* menghasilkan nilai *chi-square* sebesar 48,771 dengan *p-value* 0,000 pada $\alpha=1$ persen, mengindikasikan bahwa secara bersama-sama enam variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap perkembangan KEP. Nilai *Nagelkerke R-Square* sebesar 0,659 menunjukkan bahwa variabilitas perkembangan KEP dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 65,9 persen, sedangkan 34,1 persen sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Model memiliki ketepatan klasifikasi keseluruhan sebesar 81,9 persen dengan tingkat akurasi prediksi KEP berkembang sebesar 85,0 persen dan KEP tidak berkembang sebesar 78,1 persen.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial Regresi Logistik Biner Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkembangan KEP

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% CI Exp(B)
X1 Aktor Penggerak	0,890	0,320	7,715	1	0,005**	2,434	1,299 — 4,560
X2 Jaringan Kerja sama	1,052	0,282	13,960	1	0,000***	2,864	1,649 — 4,973
X3 Kaderisasi	0,580	0,283	4,185	1	0,041*	1,785	1,025 — 3,111
X4 Dukungan Otoritas	0,243	0,735	0,109	1	0,741 ns	1,275	0,302 — 5,379
X5 Inovasi Berkelanjutan	0,626	0,275	5,171	1	0,023*	1,870	1,090 — 3,208
X6 Pendampingan	-1,303	0,848	2,365	1	0,124 ns	0,272	0,052 — 1,430
Constant	-4,851	1,408	11,862	1	0,001	0,008	-

Sumber: Output SPSS hasil pengolahan data primer, 2025.

Keterangan: *** signifikan pada $\alpha=1\%$; ** signifikan pada $\alpha=5\%$; * signifikan pada $\alpha=5\%$; ns = tidak signifikan. Omnibus Test $\chi^2=48,771$; df=6; Sig=0,000. Hosmer-Lemeshow $\chi^2=8,860$; df=8; Sig=0,354. Nagelkerke $R^2=0,659$. Ketepatan klasifikasi=81,9%."



Gambar 5. Forest plot odds ratio dengan interval kepercayaan 95 persen memvisualisasikan signifikansi dan magnitudo pengaruh enam faktor terhadap probabilitas perkembangan KEP

Gambar 5 memvisualisasikan magnitudo pengaruh enam variabel melalui *forest plot odds ratio* dengan interval kepercayaan 95 persen. Empat variabel yang interval kepercayaannya tidak melewati garis $OR=1$ dinyatakan signifikan, sedangkan dua variabel (X4 dan X6) yang interval kepercayaannya melampaui garis tersebut dinyatakan tidak signifikan. Persamaan regresi logistik biner yang terbentuk adalah:

$$\ln(P / (1-P)) = -4,851 + 0,890 X_1 + 1,052 X_2 + 0,580 X_3 + 0,243 X_4 + 0,626 X_5 - 1,303 X_6 \dots \quad (8)$$

Pengaruh Aktor Penggerak terhadap Perkembangan KEP

Variabel aktor penggerak (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap probabilitas perkembangan KEP pada $\alpha=5$ persen dengan koefisien 0,890 dan *odds ratio* 2,434, artinya aktor penggerak yang aktif meningkatkan peluang KEP berkembang sebesar 2,434 kali dibandingkan KEP dengan aktor pengelola yang kurang atau tidak aktif. Temuan ini secara empiris memperkuat teori kepemimpinan transformasional dalam konteks kelembagaan ekonomi pedesaan, di mana keberadaan aktor penghubung (*actor interplay*) yang amanah dan kompeten secara signifikan menentukan kemampuan KEP mengintegrasikan sub-sub unit dalam sistem agribisnis. Aktor penggerak menjadi mediator yang menghubungkan persoalan pokok usaha tani yaitu ketersediaan sarana produksi, kecukupan modal, dan jaminan harga hasil produksi.

Hasil ini konsisten dengan temuan Maria et al. (2022) yang membuktikan secara empiris melalui regresi logistik di Kota Banjarbaru bahwa gaya kepemimpinan ketua kelompok dan pengaruh aktor penggerak merupakan dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pertanian, dengan akurasi klasifikasi model mencapai 92,5 persen. Studi serupa oleh Toiba et al. (2024) di Jawa Timur juga mengonfirmasi bahwa keberhasilan koperasi susu sangat tergantung pada kemampuan manajerial pengurus dalam menavigasi kompleksitas rantai pasok susu. Fatah et al. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pemberdayaan petani padi di lahan rawa Hulu Sungai Selatan berada pada tingkat sedang karena aktor pengelola kelompok belum sepenuhnya berfungsi sebagai jembatan strategis antara petani dengan jaringan pasar dan inovasi teknologi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah seleksi dan pelatihan aktor penggerak KEP harus menjadi prioritas utama program penguatan kelembagaan, dengan fokus pada pengembangan kompetensi kepemimpinan transformasional dan literasi bisnis.

Pengaruh Jaringan Kerja sama Bisnis terhadap Perkembangan KEP

Jaringan kerja sama bisnis (X2) merupakan variabel dengan pengaruh terbesar dan paling signifikan terhadap perkembangan KEP dengan koefisien 1,052 dan *odds ratio* 2,864 pada $\alpha=1$ persen, artinya KEP yang memiliki jaringan bisnis berpeluang berkembang 2,864 kali dibandingkan KEP yang tidak memiliki jaringan. Magnitudo pengaruh ini menempatkan jaringan bisnis sebagai faktor determinan paling kuat dalam transformasi KEP menuju korporasi petani. Jaringan kerja sama menyediakan

akses simultan terhadap sarana produksi yang kompetitif, pendanaan formal, transfer teknologi, dan kepastian pasar yang merupakan pilar-pilar utama keberlangsungan agribisnis modern.

Hasil ini selaras dengan *systematic review* Ton et al. (2018) yang menunjukkan bahwa *contract farming* meningkatkan pendapatan *smallholder* antara 23 hingga 54 persen di 13 negara berkembang, dengan efek terbesar ketika ada *price premium* yang dikawal kerangka kelembagaan kuat. Wardhana et al. (2020) juga mengonfirmasi bahwa kerja sama dalam *agro-cluster* Indonesia secara signifikan meningkatkan posisi tawar petani dan akses terhadap modal serta teknologi. Bukti empiris dari Kalimantan Selatan diperkuat oleh studi Hasanah et al. (2023) pada petani bawang merah di Kabupaten Tapin yang mengidentifikasi pembentukan jaringan pemasaran sebagai *buffer capacity* utama untuk meredam kerentanan ekonomi petani; ketiadaan jaringan menyebabkan petani terpaksa menjual murah atau bahkan rugi karena tidak mampu bersaing dengan komoditas impor dari luar daerah. Implikasi temuan ini sangat strategis bagi reformasi KEP di Barito Kuala: prioritas program harus diarahkan pada fasilitasi pembentukan kerja sama kontraktual antara KEP dengan *off-taker* (BUMN pangan, pasar modern, dan industri pengolahan), bukan sekadar pemberian bantuan input pertanian yang bersifat parsial.

Pengaruh Kaderisasi terhadap Perkembangan KEP

Variabel kaderisasi (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap perkembangan KEP pada $\alpha=5$ persen dengan koefisien 0,580 dan *odds ratio* 1,785, artinya KEP yang melakukan kaderisasi berpeluang berkembang 1,785 kali dibandingkan KEP tanpa kaderisasi. Hasil ini menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan dan transfer pengetahuan antar generasi dalam menjamin keberlanjutan kelembagaan ekonomi petani. Kaderisasi melalui pelibatan generasi muda atau petani milenial yang melek teknologi menjadi prasyarat modernisasi tata kelola KEP, terutama dalam mengadopsi pemasaran digital dan manajemen data.

Studi Syafruddin (2024) di Kabupaten Luwu menegaskan bahwa kapasitas petani milenial dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal individu dan faktor eksternal penyuluhan, di mana keberadaan struktur kaderisasi formal memperkuat efektivitas pengembangan kapasitas. Sitorus (2024) juga menyoroti bahwa regenerasi petani melalui pengembangan petani milenial memerlukan dukungan kebijakan, akses teknologi, dan kemudahan permodalan yang terstruktur. Implikasi praktis temuan ini adalah KEP harus mengintegrasikan program kaderisasi sebagai agenda strategis, bukan sekadar kegiatan insidental, dengan memberikan mandat manajerial nyata kepada generasi muda agar potensi inovatif mereka termobilisasi secara optimal.

Pengaruh Dukungan Otoritas terhadap Perkembangan KEP

Berbeda dengan tiga variabel sebelumnya, dukungan otoritas (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan KEP dengan koefisien 0,243 dan *odds ratio* 1,275 pada *p-value* 0,741. Temuan ini merupakan paradoks yang penting dianalisis lebih lanjut karena dukungan pemerintah secara konseptual seharusnya menjadi katalisator utama pengembangan kelembagaan. Merujuk pada analisis deskriptif sebelumnya, bantuan pemerintah yang diberikan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi masih bersifat parsial, sebatas pemberian atau peminjaman alat mesin pertanian (alsintan) atau kucuran dana hibah proyek tahunan.

Dukungan fisik semacam ini terbukti belum cukup kuat untuk mendorong transformasi KEP menjadi entitas bisnis mandiri dan berdaya saing. Minimnya dukungan bukan pendanaan (non-finansial) seperti pendampingan legalitas badan hukum, kemudahan perizinan usaha, advokasi kebijakan, dan pembukaan akses ke pasar modern membuat KEP rentan secara institusional. Akibatnya, bantuan yang masuk hanya mampu mempertahankan operasional dasar kelompok tani secara tradisional namun gagal menciptakan lompatan skala ekonomi atau profitabilitas yang menjadi indikator utama berkembangnya KEP ke arah korporasi. Temuan ini selaras dengan Siregar et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa integrasi vertikal dan dukungan substantif menjadi kunci kinerja koperasi pertanian, serta sejalan dengan kritik Jamaludin & Pambudy (2025) terhadap paradigma bantuan birokratis di Indonesia yang masih terjebak pada model proyek fisik. Kasus empiris di Kalimantan Selatan yang dilaporkan Hasanah et al. (2023) menunjukkan bahwa berakhirnya program subsidi benih untuk petani bawang merah di Tapin justru menyebabkan mayoritas petani berhenti berusaha tani karena tidak mampu mengakses modal mandiri, mengonfirmasi bahwa bantuan otoritas yang tidak diiringi penguatan kapasitas substantif tidak akan menciptakan kemandirian kelembagaan.

Pengaruh Inovasi Berkelanjutan terhadap Perkembangan KEP

Variabel inovasi berkelanjutan (X5) berpengaruh signifikan positif terhadap perkembangan KEP pada $\alpha=5$ persen dengan koefisien 0,626 dan *odds ratio* 1,870, artinya penerapan inovasi yang berkelanjutan meningkatkan peluang KEP berkembang 1,870 kali. Signifikansi variabel ini menegaskan bahwa inovasi adalah faktor pembeda kemajuan agribisnis modern, di mana KEP yang berhasil berkembang adalah mereka yang keluar dari pertanian konvensional dan mengadopsi pembaruan di berbagai lini. Inovasi tidak hanya diartikan sebatas pengadaan perangkat keras seperti komputer yang seringkali hanya berfungsi administratif, melainkan terletak pada keberanian melakukan uji coba teknologi tepat guna secara kontinu, modernisasi metode pengemasan, hingga pemanfaatan pemasaran digital.

Studi terbaru oleh Wardhani et al. (2023) pada koperasi kopi Jawa Barat menegaskan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara langsung berkorelasi dengan kinerja koperasi dan keberlanjutan agribisnis. Temuan dari Tiongkok yang dikaji Bin et al. (2024) juga menunjukkan bahwa diversifikasi inovasi industri koperasi merupakan kunci aglomerasi dan distribusi spasial koperasi yang berkembang. Konteks lokal Kalimantan Selatan diperkuat oleh Fatah et al. (2024) yang membuktikan bahwa kemampuan petani padi di Hulu Sungai Selatan dalam menentukan pasar, mempelajari permintaan, dan menetapkan harga memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pemberdayaan petani, sedangkan kemampuan perencanaan produk dan komunikasi promosi yang masih lemah menjadi titik kelemahan utama yang sangat mirip dengan kondisi KEP Barito Kuala. Implikasi temuan ini bagi KEP Barito Kuala adalah perlunya reorientasi program penguatan dari sekadar penyediaan komputer administratif menjadi pengembangan kapasitas *digital marketing*, hilirisasi produk dengan *branding*, dan adopsi sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi.

Pengaruh Pendampingan Penyuluh terhadap Perkembangan KEP

Variabel pendampingan penyuluh (X6) menunjukkan temuan paling kontra-intuitif dengan koefisien negatif sebesar -1,303 dan *odds ratio* 0,272 yang tidak signifikan pada *p-value* 0,124. Arah koefisien negatif dan ketidakbermaknaan statistik ini merupakan anomali yang menyimpang *mismatch* fundamental antara fokus pendampingan dengan kebutuhan riil KEP. Intensitas pendampingan yang tinggi selama ini tampaknya masih sangat bias pada persoalan teknis budidaya pertanian di lahan (*on-farm*) seperti cara tanam, takaran pemupukan, dan pemberantasan hama; sementara edukasi pada aspek manajerial bisnis (*off-farm*), literasi keuangan, teknik negosiasi kontrak dagang, dan manajemen rantai pasok agribisnis justru masih sangat minim disentuh.

Hal ini diperkuat fakta empiris dari Tabel 6 yang menunjukkan 100,00 persen KEP tidak menerima evaluasi pendampingan, sehingga pendampingan berjalan tanpa instrumen ukur dampak yang jelas. Fatah et al. (2024) di Hulu Sungai Selatan menegaskan bahwa hubungan antara petani dan penyuluh memang terjaga baik secara sosial, namun frekuensi diskusi substantif mengenai persoalan riil yang dihadapi petani masih sangat rendah, sehingga pendampingan belum berkontribusi pada penguatan posisi tawar petani sebagai pelaku usaha tani. Temuan ini paradoksial dengan studi Maria et al. (2022) di Banjarbaru yang justru menemukan pengaruh aktor penyuluh signifikan terhadap partisipasi masyarakat pada pertanian perkotaan; perbedaan ini diduga karena konteks pertanian perkotaan Banjarbaru menghadirkan penyuluh dengan kompetensi agribisnis yang lebih mutakhir, sementara pendampingan pada KEP di kawasan rawa Barito Kuala masih didominasi materi teknis budidaya konvensional. Wardani & Anwarudin (2018) di Bogor juga menemukan bahwa penyuluh tradisional cenderung kurang efektif dalam memfasilitasi transformasi kelembagaan menuju basis ekonomi yang lebih kompleks. Temuan ini menuntut reorientasi paradigma pendampingan dari sekadar instruktur teknis budidaya menjadi konsultan agribisnis yang mumpuni, dengan kurikulum yang menyentuh manajemen bisnis, pemasaran digital, dan negosiasi kontrak.

KESIMPULAN

Perkembangan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kabupaten Barito Kuala berada pada kategori kurang berkembang dengan indeks komposit 0,47, di mana komponen perkembangan omzet menjadi titik terlemah dengan indeks 0,35 dan komponen membantu permodalan menjadi titik terkuat dengan indeks 0,55. Empat faktor terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap probabilitas perkembangan KEP, yaitu jaringan kerja sama bisnis dengan pengaruh terbesar (OR=2,864), aktor penggerak (OR=2,434), inovasi berkelanjutan (OR=1,870), dan kaderisasi pengelola (OR=1,785); sementara dukungan otoritas dan pendampingan penyuluh tidak berpengaruh signifikan. Model

regresi logistik biner mampu menjelaskan 65,9 persen variabilitas perkembangan KEP dengan ketepatan klasifikasi keseluruhan 81,9 persen.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah penguatan KEP harus berfokus pada pembangunan kerangka internal kelembagaan yaitu pengembangan kapasitas aktor penggerak, fasilitasi pembentukan kontrak kerja sama bisnis dengan *off-taker*, percepatan kaderisasi pengelola muda, dan pendorongan inovasi berkelanjutan; sementara reformasi dukungan otoritas dan pendampingan harus bergeser dari paradigma proyek fisik menjadi pendampingan substansi bisnis berbasis evaluasi terukur. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala disarankan menunda target penambahan kuantitas KEP baru dan mengalihkan sumber daya untuk program rehabilitasi dan kurasi 242 KEP yang telah ada agar menjadi *bankable* dan *profitable*, sekaligus mengintegrasikan Brigade Pangan ke dalam skema korporasi petani berbasis kawasan secara terpusat dan profesional.

Penelitian lanjutan disarankan menggunakan rancangan longitudinal selama 2 hingga 3 tahun ke depan untuk mengevaluasi keberlanjutan KEP bentuk Brigade Pangan setelah bantuan alsintan dan saprodi dari pemerintah dihentikan atau menyusut, serta menelaah secara kuantitatif laporan keuangan KEP melalui rasio profitabilitas dan likuiditas guna mendapatkan gambaran kesehatan finansial yang lebih akurat. Kajian komparatif antar tipologi agroekosistem juga perlu dikembangkan untuk menguji generalisasi temuan ini ke wilayah lahan rawa pasang surut lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, Alan. (2018). *An introduction to categorical data analysis*. John Wiley & Sons.
- Badan Ketahanan Pangan. (2021). *Indeks ketahanan pangan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 — Tahap I*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>
- BSIP Kalimantan Selatan. (2023). *Identifikasi standar instrumen pertanian komoditas jeruk siam banjar*. Banjarbaru: Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian.
- Bin, L., Chengli, T., Guohua, Z., Qiuhong, L., & Chun, Y. (2024). Spatial distribution, influencing factors and innovative development countermeasures of farmer cooperatives in Hunan Province, China. *Scientific Reports*, 14(1), 11308.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques*. John Wiley & Sons.
- Effendy, L. (2020). Model pengembangan kelembagaan petani menuju kelembagaan ekonomi petani di Kecamatan Sindangkasih Ciamis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 38–47.
- Fatah, L., Heiriyani, T., & Fajeri, H. (2022). Wetland farmer's adoption stage of agribusiness system in Hulu Sungai Selatan Regency, Indonesia. *International Journal of Biosciences*, 21(6), 307–315. <https://doi.org/10.12692/ijb/21.6.307-315>
- Fatah, L., Heiriyani, T., & Husaini, M. (2024). Factors affecting farmer empowerment in rice marketing. *International Journal of Biosciences*, 24(2), 77–88. <https://doi.org/10.12692/ijb/24.2.77-88>
- Haryanto, Y., Rusmono, M., & Purboingtyas, T. P. (2022). Analisis Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani pada Komunitas Petani Padi di Lokasi Food Estate. *Jurnal Penyuluhan*, 18(2).
- Hasanah, L. N., Fatah, L., Bachri, A. A., & Susanti, H. (2023). Marketing vulnerability of shallot farming in Tapin Regency, South Kalimantan, Indonesia. *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 13(4), 27–33. <https://doi.org/10.7176/JBAH/13-4-04>
- Hosmer Jr, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression*. John Wiley & Sons.
- Jamaludin, A., & Pambudy, R. (2025). *Transformasi Kelembagaan Pertanian melalui Korporasi Petani: Dampak Pengembangan Korporasi Petani terhadap Kinerja Usahatani: Transforming Agricultural Institutions through Corporate Farming: Assessing the Impact on Farm Performance*.

- Kementerian Pertanian. (2018). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Maria, H., Fattah, L., & Azis, Y. (2022). Level of community participation in community-based urban farming development in Banjarbaru City, Indonesia. *European Journal of Agriculture and Food Sciences*, 4(5), 1–6.
- Noeng, S., Windari, W., & Nurlaili, N. (2019). Strategi Penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan Pembangunan*, 1(1), 71–80.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siregar, A. P., O'Donoghue, C., & Whay, B. (2025). Integration effects on agricultural cooperative performance: A study case in Java Island, Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 528, 146737.
- Sitorus, R. (2024). Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pendampingan Petani Milenial. *Jurnal Penyuluhan*, 20(1).
- Syafruddin, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kapasitas Petani Milenial Dalam Upaya Percepatan Regenerasi Petani Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 12(1), 45–58.
- Toiba, H., Rahman, M. S., Hartono, R., & Retnoningsih, D. (2024). Improving dairy farmers' welfare in Indonesia: Does cooperative membership matter? *Annals of Public and Cooperative Economics*, 95(4), 1003–1019.
- Ton, G., Vellema, W., Desiere, S., Weituschat, S., & D'Haese, M. (2018). Contract farming for improving smallholder incomes: What can we learn from effectiveness studies? *World Development*, 104, 46–64.
- Wardani, W., & Anwarudin, O. (2018). Peran penyuluh terhadap penguatan kelompok tani dan regenerasi petani di Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Journal TABARO Agriculture Science*, 2(1), 191–200.
- Wardhana, D., Ihle, R., & Heijman, W. (2020). Farmer cooperation in agro-clusters: Evidence from Indonesia. *Agribusiness*, 36(4), 725–750.
- Wardhani, W. F., Karyani, T., Setiawan, I., & Rustidja, E. S. (2023). The impact of capability on cooperative performance and sustainability: a case study of west java coffee farmers cooperatives. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 4(2), 107–111.